

EVALUASI PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN *E-PROCUREMENT* DI KOTA MALANG DITINJAU DARI SEGI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Alifadri Indrayana
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 167, Malang 65145, Indonesia
E-mail : vinoalifsebastian@yahoo.com

ABSTRAK

E-procurement dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengadaan, sehingga pemerintah mengeluarkan Perpres 54 Tahun 2010. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. Pada penerapannya selama ini belum diketahui apakah pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dimana objek penelitian ini adalah responden yang melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang yang terjadi selama kurun waktu sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013. Responden penelitian ini adalah kontraktor *grade 5, 6 dan 7* serta PPK dan Pokja ULP selaku panitia pengadaan di Kota Malang. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengujian hipotesis dan metode IPA (*Importance Performance Analysis*). Setelah dilakukan pengolahan, pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t terhadap semua variabel menunjukkan uji t dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan pada pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah transparan dan akuntabel dari pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Pada metode IPA dari segi transparansi dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 87,74 %, dari segi akuntabilitas Pengguna Jasa memperoleh IP yaitu sebesar 89,25 %, sedangkan dari segi akuntabilitas Penyedia Jasa memperoleh IP yaitu sebesar 85,40 %. Variabel yang kinerjanya sudah baik dan dianggap penting oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dari segi transparansi yaitu Jadwal lelang dan Dokumen Pengadaan, dan Penyedia Jasa dari segi akuntabilitas yaitu Jadwal lelang, *Addendum* Dokumen Pengadaan dan Pengumuman Pemenang, Sedangkan Pengguna Jasa dari segi akuntabilitas yaitu Jadwal lelang dan Pengumuman Pemenang.

Kata kunci : *e-procurement*, pengadaan pekerjaan konstruksi, IPA (*Importance Performance Analysis*)

1. PENDAHULUAN

Sebelum Perpres No. 54 Tahun 2010 menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan sistem *e-procurement* (pengadaan elektronik) di gunakan Keppres No. 80 Tahun 2003. Pada pelelangan manual tertulis pada

dokumen pengadaan yang hanya dapat diambil oleh penyedia yang mendaftar dan apabila ada perubahan tahapan pelelangan maka Pokja ULP/Panitia Pengadaan mengumumkan melalui papan pengumuman dan juga hanya

dapat diakses oleh peserta pelelangan atau pengunjung yang “kebetulan” melihat-lihat papan pengumuman. Pengumuman pemenang pada lelang manual dilaksanakan juga pada papan pengumuman yang memuat nama peserta yang jadi pemenang dan 2 cadangan apabila ada. Peserta yang lain tidak dapat melihat siapa-siapa saja yang gugur dalam tahapan pemilihan serta alasan pengguguran peserta. Hal ini berarti keterbukaan atau transparansi lelang manual dibatasi oleh akses kepada papan pengumuman dan media cetak (<http://khalidmustafa.info>).

Persaingan usaha yang tidak sehat (*premanisme bad governance*), kolusi, persengkokolan antara pengguna jasa dan calon penyedia jasa, antara sesama calon penyedia jasa, informasi harga dan akses pasar yang terbatas dan tersekat-sekat (*fragmented*) melatar belakangi munculnya peraturan tentang pengadaan secara elektronik, dan saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia sudah melaksanakan transaksi elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi. (Tutang Muhtar, 2011).

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). *E-procurement* merupakan layanan pengadaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sistem ini berusaha mengatur transaksi bisnis melalui teknologi komputer, di mana proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online. (Tutang Muhtar, 2011).

Landasan hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan sistem *e-procurement* (pengadaan elektronik) adalah Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” dan sebagai

penyempurnaan Keppres No. 80 tahun 2003 serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing-masing Departemen, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem layanan ini. Dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2010 bertujuan agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Penelitian ini akan mengevaluasi pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai ≥ 5 M secara *e-procurement* di Kota Malang ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas dari sudut pandang Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP (Unit Layanan Pengadaan) dalam kurung sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013. Sehingga dapat diketahui apakah pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi adalah keterlibatan secara aktif yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam penilaian kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pelelangan barang dan jasa di LPSE, serta seberapa jauh hasil pelelangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat dilihat dari memberikan penilaian terhadap hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE serta pengambilan keputusan setelah penilaian dari hasil pelelangan barang dan jasa di LPSE.

E-procurement merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi (Croom dan Jones, 2007). Selain itu Tatsis dkk., (2006) juga mendefinisikan *e-procurement* sebagai penggabungan manajemen, otomisasi, dan optimisasi dari suatu proses pengadaan organisasi dengan menggunakan sistem elektronik berbasis web. Davila dkk., (2003) menambahkan definisi tentang *e-procurement* yaitu sebuah teknologi. *E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). *E-procurement* dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan dengan sistem konvensional yang dilakukan dengan langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait pengadaan. *E-procurement* hadir dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa serta untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, adil dan transparan. Proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-procurement* memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pelelangan umum secara elektronik. Pada tahun 2010, terdapat 48 instansi pemerintah di Indonesia baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan sistem *e-procurement* (LKPP, 2009).

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. (Perpres No. 54 Tahun 2010).

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. (Perpres No. 54 Tahun 2010).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode survey yang menggunakan instrumen kuisioner untuk mendapatkan tanggapan dari responden yang berupa pernyataan dengan skala *likert*. Populasi penelitian meliputi Penyedia Jasa yang terdiri dari kontraktor *grade* 5, 6, dan 7 yang pernah mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi secara elektronik dalam kurung sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 di wilayah Kota Malang dan Pengguna Jasa terkait dalam penerapan *e-Procurement* di wilayah tersebut.

Guna mengetahui pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-Procurement* di Kota Malang apa sudah transparan/akuntabilitas pada pengadaan pekerjaan konstruksi, digunakan skala 4 point yang dijadikan tolak ukur dari pernyataan-pernyataan pada variabel yang merupakan proses tahapan pengadaan adalah :

- | | |
|---------------------|-----|
| a. Sangat Baik (SB) | : 4 |
| b. Baik (B) | : 3 |
| c. Kurang Baik (KB) | : 2 |
| d. Tidak Baik (TB) | : 1 |

Dimana interpretasi skor rata-rata :

- a. 76 – 100 % : Tinggi
- b. 51 – 75 % : Cukup Tinggi
- c. 26 – 50 % : Rendah
- d. 0 – 25 % : Sangat Rendah

Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah *e-procurement* yang dilaksanakan sudah transparan/akuntabel atau tidak. Dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk data interval atau rasio digunakan uji t satu sampel (*one sampel t – test*). Untuk melihat kebenaran hipotesis adalah dengan cara membandingkan nilai t_{tabel} dengan t_{hitung} dimana H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, dengan formula hipotesis yang diterapkan :

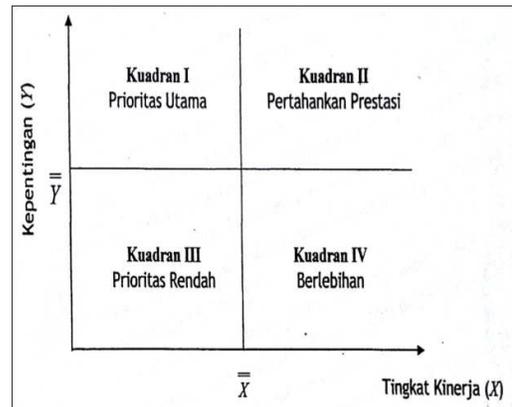
H_0 :Variabel X yaitu tahap proses pengadaan dengan *e-Procurement* **sudah transparan** pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

H_1 :Variabel X yaitu tahap proses pengadaan dengan *e-Procurement* **belum transparan** pada pengadaan pekerjaan konstruksi.

Metode IPA (*Importance-Performance Analysis*)

Metode *IPA* mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan. *IPA* mengabungkan pengukuran faktor tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dalam grafik dua dimensi yang memudahkan penjelasan dan mendapatkan usulan praktis. Interpretasi grafik *IPA* sangat mudah, dimana grafik *IPA* dibagi menjadi

empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *importance performance*.



Gambar 1. Kuadran *Importance-Performance Analysis*

Diagram ini terdiri dari empat kuadran (Suapranto dalam Oktaviani dan Suryana 2006:46), yaitu :

1. Kuadran I (Prioritas Utama)

Kuadran ini membuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh konsumen tetapi pada kenyataannya atribut-atribut tersebut belum sesuai dengan harapan konsumen. Tingkat kinerja dari atribut tersebut lebih rendah dari harapan konsumen. Tingkat kinerja dari atribut lebih rendah dari harapan konsumen terhadap atribut tersebut. Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan konsumen.

2. Kuadran II (Pertahankan Prestasi)

Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini menunjukkan bahwa atribut tersebut penting dan memiliki kinerja yang tinggi. Atribut ini perlu dipertahankan untuk waktu selanjutnya.

3. Kuadran III (Prioritas Rendah)

Atribut yang terdapat pada kuadran ini dianggap kurang penting oleh

konsumen dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu baik. Peningkatan pada atribut yang masuk dalam kuadran ini perlu dipertimbangkan lagi karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh konsumen terbilang kecil.

4. Kuadran IV (Berlebihan)

Atribut yang terdapat dalam kuadran ini dianggap kurang penting oleh konsumen dan dirasakan terlalu berlebihan. Peningkatan kinerja yang terdapat dalam kuadran ini hanya akan menyebabkan terjadinya pemborosan sumber daya.

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1. Objek Penelitian dan Responden

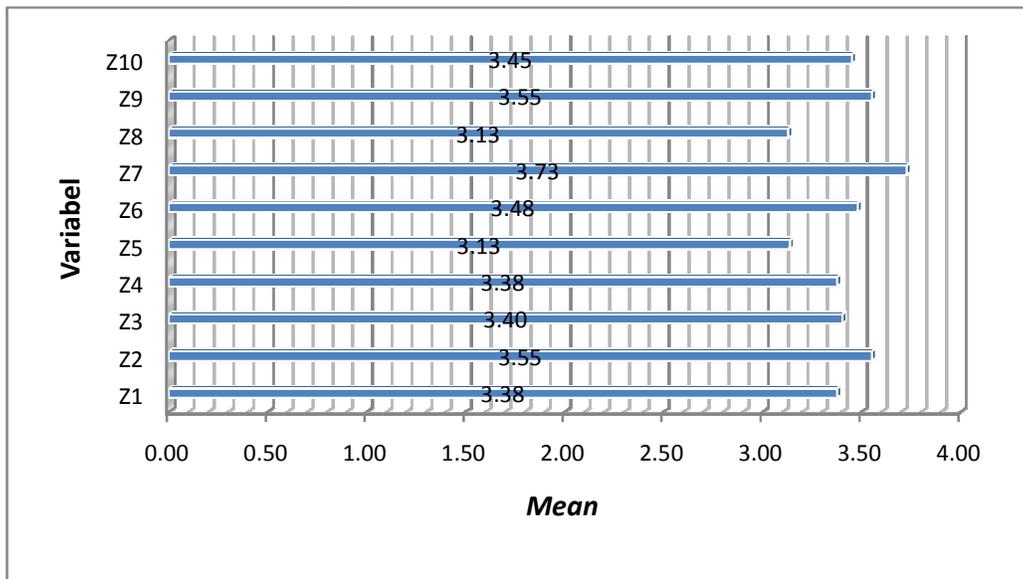
Berdasarkan hasil penelitian yang dihimpun terhadap data dari LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dapat diketahui bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai ≥ 5 M secara elektronik yang dilaksanakan di Kota Malang dijalankan sejak diberlakukannya Perpres No. 70 Tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2013 sebanyak 4 LPSE instansi yaitu Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang, Universitas Negeri Malang dan Kota Malang. Kuisisioner yang disebarakan kepada Penyedia Jasa sebanyak 20 kuisisioner, sedangkan yang

disebarakan kepada Pengguna Jasa yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja ULP 27 data kuisisioner berhasil dikumpulkan peneliti.

4.2. Hasil Analisa Tanggapan Responden Penyedia Jasa Mengenai Akuntabilitas

Untuk mengetahui pendapat dan penilaian responden Penyedia Jasa maka dilakukan analisa terhadap hasil jawaban yang berupa skala terhadap pernyataan-pernyataan dari variabel tahapan pengadaan yang diteliti. Berdasarkan seluruh hasil dari rata-rata tiap variabel, dapat diketahui bahwa semua variabel dipersepsi responden sangat baik penilaian penyedia jasa dari segi akuntabilitas pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditunjukkan pada gambar 2.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis segi akuntabilitas dengan reponden Penyedia Jasa, proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah akuntabel karena dari hasil uji hipotesis terhadap semua variabel menunjukkan nilai t lebih besar daripada nilai batas daerah kritis -2.861 . Dengan kata lain nilai t yang diperoleh berada dalam daerah penerimaan, maka menerima H_0 atau dapat diterima yang ditunjukkan pada tabel 1.



Gambar 2. Nilai *Mean* Tiap Variabel Pada Responden Penyedia Jasa

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Segi Akuntabilitas Dengan Responden Penyedia Jasa

Variabel	t hitung	Keterangan
Pengumuman Lelang (Z_1)	0.578	H_0 diterima
Jadwal Lelang (Z_2)	0.620	H_0 diterima
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan (Z_3)	0.584	H_0 diterima
Dokumen Pengadaan (Z_4)	1.460	H_0 diterima
<i>Aanwijzing</i> /Berita Acara Pemberian Penjelasan (Z_5)	1.015	H_0 diterima
<i>Addendum</i> Dokumen Pengadaan (Z_6)	0.602	H_0 diterima
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Z_7)	0.658	H_0 diterima
Kelulusan Peserta (Z_8)	0.510	H_0 diterima
Pengumuman Pemenang (Z_9)	0.620	H_0 diterima
Sanggahan Peserta Lelang (Z_{10})	1.472	H_0 diterima

pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditunjukkan pada gambar 3.

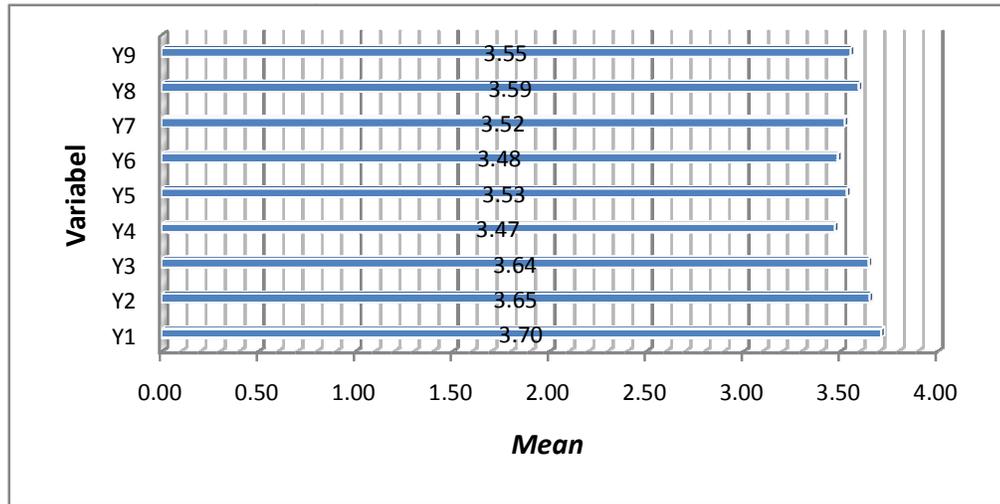
4.3. Hasil Analisa Tanggapan Responden Pengguna Jasa Mengenai Akuntabilitas

Berdasarkan seluruh hasil dari rata-rata tiap variabel, dapat diketahui bahwa semua variabel dipersepsi responden sangat baik penilaian pengguna jasa dari segi akuntabilitas

Setelah dilakukan pengujian hipotesis segi akuntabilitas dengan reponden Pengguna Jasa, proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah akuntabel karena dari hasil uji hipotesis terhadap semua variabel menunjukkan nilai t lebih besar daripada nilai batas

daerah kritis -2.779. Dengan kata lain nilai t yang diperoleh berada dalam daerah penerimaan, maka menerima H_0

atau dapat diterima yang ditunjukkan pada tabel 2.



Gambar 3. Hasil Persentase *Mean* Responden Pokja ULP

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Segi Akuntabilitas Dengan Responden Pengguna Jasa

Variabel	t hitung	Keterangan
Pengumuman Lelang (Y_1)	1.160	H_0 diterima
Jadwal Lelang (Y_2)	0.653	H_0 diterima
Dokumen Pengadaan (Y_3)	1.148	H_0 diterima
<i>Aanwijzing</i> /Berita Acara Pemberian Penjelasan (Y_4)	1.883	H_0 diterima
<i>Addendum</i> Dokumen Pengadaan (Y_5)	1.126	H_0 diterima
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (Y_6)	1.116	H_0 diterima
Kelulusan Peserta (Y_7)	1.122	H_0 diterima
Pengumuman Pemenang (Y_8)	1.139	H_0 diterima
Sanggahan Peserta Lelang (Y_9)	1.537	H_0 diterima

4.4. Hasil Analisa Tanggapan Responden Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Mengenai Transparansi

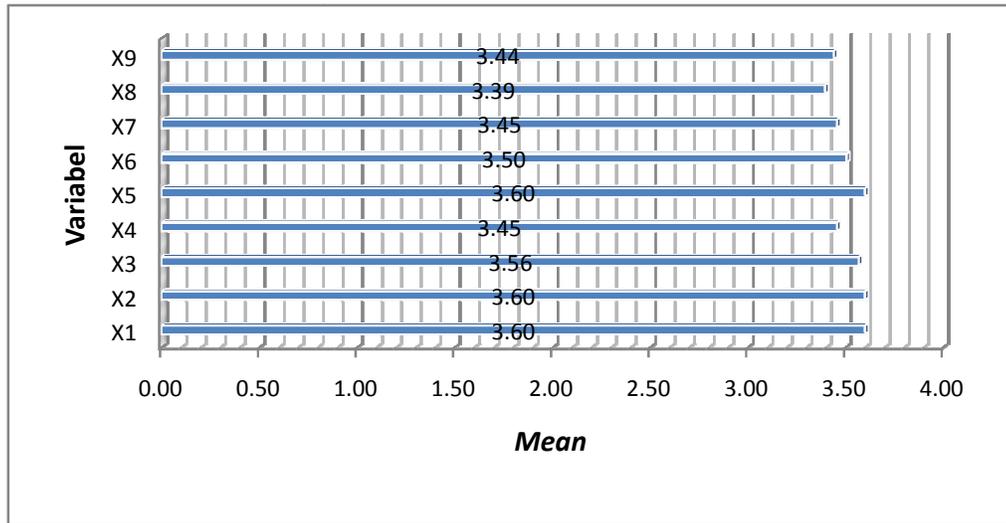
Berdasarkan seluruh hasil dari rata-rata tiap variabel, dapat diketahui bahwa semua variabel dipersepsi responden sangat baik penilaian penyedia jasa dan pengguna jasa dari

segi transparansi pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang ditunjukkan pada gambar 4.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis segi transparansi dengan responden Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa, proses pengadaan pekerjaan konstruksi dengan *e-procurement* di Kota Malang sudah transparan karena dari hasil uji hipotesis terhadap semua variabel menunjukkan nilai t lebih besar

daripada nilai batas daerah kritis -2.687. Dengan kata lain nilai t yang diperoleh berada dalam daerah penerimaan, maka

menerima H_0 atau dapat diterima yang ditunjukkan pada tabel 3.



Gambar 4. Nilai Mean Tiap Variabel Pada Responden Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Segi Transparansi Dengan Responden Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa

Variabel	t hitung	Keterangan
Pengumuman Lelang (X_1)	0.670	H_0 diterima
Jadwal Lelang (X_2)	0.670	H_0 diterima
Dokumen Pengadaan (X_3)	0.662	H_0 diterima
Aanwijzing/Berita Acara Pemberian Penjelasan (X_4)	1.185	H_0 diterima
Addendum Dokumen Pengadaan (X_5)	0.670	H_0 diterima
Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) (X_6)	0.647	H_0 diterima
Kelulusan Peserta (X_7)	1.185	H_0 diterima
Pengumuman Pemenang (X_8)	1.169	H_0 diterima
Sanggahan Peserta Lelang (X_9)	0.631	H_0 diterima

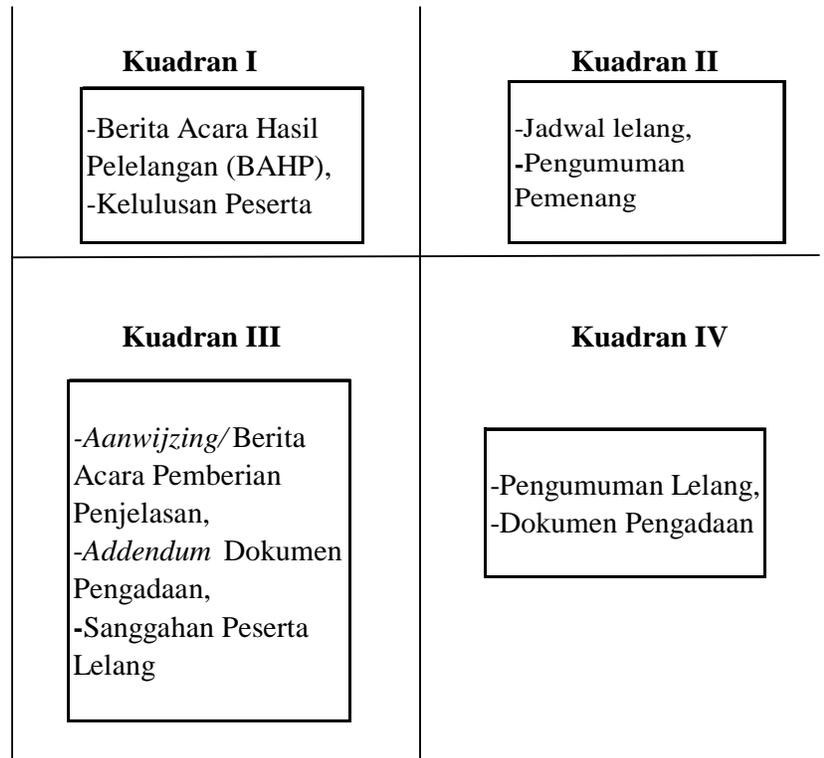
4.5. Metode IPA Akuntabilitas dari Pihak Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode IPA nilai IP (*Index Performance*) dari segi

akuntabilitas Pengguna Jasa dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 89,25 %. Berikut adalah hasil variabel-variabel yang

dikelompokkan ke dalam kuadran-

kuadran, dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Kuadran-kuadran Akuntabilitas Pengguna Jasa

4.6. Metode IPA Akuntabilitas dari Pihak Penyedia Jasa

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode IPA nilai IP (*Index Performance*) dari segi

akuntabilitas Penyedia Jasa dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 85,40 %. Berikut adalah hasil variabel-variabel yang dikelompokkan ke dalam kuadran-kuadran, dapat dilihat pada gambar 6.

<p>Kuadran I</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Dokumen Pengadaan, - Aanwijzing/Berita Acara Pemberian</p> </div>	<p>Kuadran II</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Jadwal lelang, -Addendum Dokumen Pengadaan, -Pengumuman Pemenang</p> </div>
<p>Kuadran III</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Pengumuman Lelang, -Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan, -Kelulusan Peserta</p> </div>	<p>Kuadran IV</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>-Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), -Sanggahan Peserta Lelang</p> </div>

Gambar 6. Kuadran-kuadran Akuntabilitas Penyedia Jasa

4.7. Metode IPA Transparansi dari Pihak Penyedia dan Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode IPA nilai IP (*Index Performance*) dari segi akuntabilitas Pengguna Jasa dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*)

yaitu sebesar 87,74 %. Berikut adalah hasil variabel-variabel yang dikelompokkan ke dalam kuadran-kuadran, dapat dilihat gambar 7.

<p>Kuadran I</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>-Pengumuman Pemenang -Sanggahan Peserta Lelang</p> </div>	<p>Kuadran II</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>-Jadwal lelang, -Dokumen Pengadaan,</p> </div>
<p>Kuadran III</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>- Aanwijzing/Berita Acara Pemberian Penjelasan, - Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), -Kelulusan Peserta</p> </div>	<p>Kuadran IV</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>-Pengumuman Lelang, - Addendum Dokumen Pengadaan</p> </div>

Gambar 7. Kuadran-kuadran Transparansi dari Pihak Penyedia dan Pengguna Jasa

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji z terhadap semua variabel dari segi transparansi menunjukkan uji z dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengadaan pada pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan e-procurement di Kota Malang sudah transparan.
2. Pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t terhadap semua variabel dari segi akuntabilitas pengguna jasa menunjukkan uji t dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa PPK dan POKJA ULP sudah melaksanakan *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas.
3. Pada hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji t terhadap semua variabel dari segi akuntabilitas penyedia jasa menunjukkan uji t dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penyedia jasa sudah melaksanakan semua ketentuan dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi secara *e-procurement* sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam segi akuntabilitas.
4. Pada metode IPA dapat diketahui nilai IP (*Index Performance*) dari segi transparansi dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 87,74 %.
5. Pada metode IPA dapat diketahui nilai IP (*Index Performance*) dari segi akuntabilitas Pengguna Jasa dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 89,25 %.
6. Pada metode IPA dapat diketahui nilai IP (*Index Performance*) dari

segi akuntabilitas Penyedia Jasa dihasilkan penilaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik dengan memperoleh IP (*Index Performance*) yaitu sebesar 85,40 %.

7. a). Pada analisa Kuadran *Cartesius* dapat diketahui faktor-faktor yang mendapat perhatian utama dari segi transparansi dengan responden penyedia jasa dan pengguna jasa, pada variabel Pengumuman Pemenang dan Sanggahan Peserta Lelang berada pada kuadran I yaitu dianggap penting sedangkan kinerjanya dinilai dianggap kurang baik, maka perlunya peningkatan kinerja pada variabel ini. Sedangkan untuk variabel *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Kelulusan Peserta berada pada kuadran III yaitu dinilai kinerjanya kurang baik tetapi dianggap juga kurang penting begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi jika ingin meningkatkan kinerja pada variabel ini.
 - b). Pada analisa Kuadran *Cartesius* dapat diketahui faktor-faktor yang mendapat perhatian utama dari segi transparansi dengan responden penyedia jasa, pada variabel Pengumuman Pemenang berada pada kuadran I yaitu dianggap penting sedangkan kinerjanya dinilai dianggap kurang baik, maka perlunya peningkatan kinerja pada variabel ini. Sedangkan untuk variabel *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Kelulusan Peserta berada pada kuadran III yaitu dinilai kinerjanya kurang baik tetapi dianggap juga kurang penting begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi jika ingin meningkatkan kinerja pada variabel ini.
 - c). Pada analisa Kuadran *Cartesius* dapat diketahui faktor-faktor yang mendapat perhatian utama dari segi transparansi dengan responden pengguna jasa, pada variabel Pengumuman Pemenang dan Sanggahan Peserta Lelang berada pada kuadran I yaitu dianggap penting sedangkan kinerjanya dinilai dianggap kurang baik, maka perlunya peningkatan kinerja pada variabel ini. Sedangkan untuk variabel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) berada pada kuadran III yaitu dinilai kinerjanya kurang baik tetapi dianggap juga kurang penting begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi jika ingin meningkatkan kinerja pada variabel ini.
8. Pada analisa Kuadran *Cartesius* dapat diketahui faktor-faktor yang mendapat perhatian utama dari segi akuntabilitas dengan responden pengguna jasa, pada variabel Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dan Kelulusan Peserta berada pada kuadran I yaitu dianggap penting sedangkan kinerjanya dinilai dianggap kurang baik, maka perlunya peningkatan kinerja pada variabel ini. Sedangkan untuk variabel *Aanwijzing*/Berita Acara Pemberian Penjelasan, *Addendum* Dokumen Pengadaan dan Sanggahan Peserta Lelang berada pada kuadran III yaitu dinilai kinerjanya kurang baik tetapi dianggap juga kurang penting begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi jika ingin meningkatkan kinerja pada variabel ini.
 9. Pada analisa Kuadran *Cartesius* dapat diketahui faktor-faktor yang mendapat perhatian utama dari segi akuntabilitas dengan responden

penyedia jasa, pada variabel Dokumen Pengadaan dan *Aanwijzing/Berita* Acara Pemberian Penjelasan berada pada kuadran I yaitu dianggap penting sedangkan kinerjanya dinilai dianggap kurang baik, maka perlunya peningkatan kinerja pada variabel ini. Sedangkan untuk variabel Pengumuman Lelang, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dan Kelulusan Peserta berada pada kuadran III yaitu dinilai kinerjanya kurang baik tetapi dianggap juga kurang penting begitu penting, maka perlu adanya pertimbangan yang lebih matang lagi jika ingin meningkatkan kinerja pada variabel ini.

Saran

1. Kepada perusahaan Penyedia Barang/Jasa baik di Malang maupun di Surabaya disarankan untuk membangun pandangan bahwa keberhasilan dan sukses bukan dibangun dengan persekongkolan melainkan dengan kepedulian terhadap profesionalisme dan kejujuran.
2. Perlu ditingkatkan manajemen kontrol yang lebih baik untuk menciptakan proses pengadaan yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
3. Kepada Pengguna Jasa di Kota Malang disarankan untuk menerapkan dengan sungguh-sungguh peraturan secara benar untuk menumbuhkan keadilan dan kepentingan yang jauh dari bentuk-bentuk penyimpangan.
4. Perlu adanya perbaikan pada sistem LPSE dan SPSE agar Penyedia menanggapi positif terhadap Panitia Pengadaan.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyimpangan

pada proses pengadaan secara elektronik. Karna pada dasarnya pada setiap tahap pengadaan masih terdapat indikasi penyimpangan. Selain itu dapat pula membedakan *e-Procurement* yang berada di kalangan pemerintah dengan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Croom, S.R., Brandon-Jones, A. (2007), "Impact of E-procurement: experiences from implementation in the UK public sector", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 13, Hal. 294–303.
- Davila, A., Gupta, M., Palmer, R. (2003), "Moving procurement systems to the internet : the adoption and use of e-Procurement technology models", *European Management Journal*, Vol.21, No. 1, Hal 11.
- Demin, J.E (2002), *Insight Matters: Global Network Considerations for E-Procurement and Extranets*, Infonet Services Corporation, Vol.1, Singapore.
- Tatsis, V., Mena, C., VanWassenhove, L.N., Whicker, L. (2006), "Procurement in the Greek Food and Drink Industry", *Journal of Purchasing & Supply Management*, Vol. 12, hal. 63–74. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
- Teo, H, T.S., Hung, K. (2009), " Usage and Performance Impact of Electronic Procurement", *Journal of Business Logistics*.

- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Petunjuk Pengoperasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional.
- Unas, Saifoe El. 2012. *E-Book Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Unas, Saifoe El. 2012. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Pengadaan Perguruan Tinggi*.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supranto, J. 2006. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- <http://khalidmustafa.info> diakses pada 19 Januari 2014.
- <http://esa155.blog.esaunggul.ac.id/2013/01/06/pengujian-hipotesis-3/> diakses pada 1 Mei 2014.
- <http://rumushitung.com/2013/01/23/tabel-t-dan-cara-menggunakannya/> diakses pada 7 Mei 2014.